



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT KOMISI VI DPR RI
B I D A N G
PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM, BUMN,
INVESTASI, DAN BADAN STANDARDISASI NASIONAL**

Tahun Sidang	: 2009-2010
Masa Persidangan	: II
Rapat ke	: 9
Jenis Rapat	: Rapat Dengar Pendapat
Sifat Rapat	: Terbuka
Hari, tanggal	: Senin, 8 Februari 2010
W a k t u	: Pukul 14.00 s/d 19.30 WIB
Tempat	: Ruang Rapat Komisi VI DPR RI
A c a r a	: 1. Pengantar Ketua Rapat; 2. Penjelasan Direktur Utama PT. Pertamina atas pertanyaan lisan Anggota Komisi VI DPR RI 3. Tanya Jawab 4. Penutup
Ketua Rapat	: Ir. Airlangga Hartarto, MMT, MBA didampingi Wakil Ketua Komisi VI DPR RI (Aria Bima, dan Ir.Nurdin Tambubolon)
Sekretaris Rapat	: Wahyu Prameswari, SH, M.Si (Kabagset Komisi VI)
Hadir	: A. Direktur Utama PT. Pertamina beserta jajaran B. 41 orang dari 52 orang Anggota.

KESIMPULAN RAPAT

I. PENDAHULUAN

1. Rapat Dengar Pendapat Komisi VI DPR RI dengan Direktur Utama PT. Pertamina (Persero) dibuka pada pukul 14.35 WIB setelah kuorum terpenuhi, dan sifat rapat dinyatakan terbuka untuk umum.
2. Ketua Rapat menginformasikan bahwa Rapat Dengar Pendapat kali ini merupakan RDP lanjutan tanggal 23 Nopember 2009.
3. Ketua Rapat memberikan kesempatan kepada Direktur Utama PT. Pertamina (Persero) untuk menyampaikan penjelasan atas pertanyaan lisan Anggota Komisi VI DPR RI.
4. Ketua Rapat memberikan kesempatan kepada yang terhormat Bapak/Ibu Anggota Komisi VI DPR RI untuk menanggapi atas penjelasan Direktur Utama PT. Pertamina (Persero).

II. KESIMPULAN


1. Komisi VI DPR RI meminta kepada Pemerintah untuk memberikan kebijakan fiskal (insentif pajak) berupa pembebasan bea masuk dan Pajak Dalam Rangka Impor (PDRI) terhadap barang-barang modal serta menanggung PPN atas katalis dan suku cadang dalam penambahan kapasitas kilang minyak.
2. Dalam upaya untuk meningkatkan kinerja Pertamina sehingga mampu berkembang seperti perusahaan *National Oil Company* lainnya, maka Komisi VI DPR RI meminta kepada Pemerintah untuk dapat mengurangi setoran dividen untuk pemerintah, sehingga Pertamina memiliki kesempatan memupuk modal untuk mengembangkan bisnisnya, disamping Pertamina juga harus meningkatkan efisiensi dalam setiap kegiatan operasinya.
3. Komisi VI DPR RI meminta kepada Pertamina untuk membuat skala prioritas dalam pengembangan korporasi di kegiatan hulu, pengolahan dan hilir yang akan dikelola sesuai ketersediaan sumber dana, sumber daya manusia, dan kapasitas teknologi yang dimiliki.
4. Komisi VI DPR RI meminta kepada Pertamina meningkatkan laba dan mengelola perusahaan yang baik dengan membuat jadwal kesiapan (*time frame*) yang jelas untuk menjadi *non-listed public company* pada semester II tahun 2010.
5. Komisi VI DPR RI meminta kepada Pertamina untuk :
 - meningkatkan sinergi antar BUMN dalam menuntaskan program konversi minyak tanah ke LPG dengan mengutamakan pengadaan tabung dari hasil produksi pabrikan dalam negeri, khususnya BUMN.
 - memanfaatkan BUMN Strategis seperti PT. PAL dan PT. BBI dalam kegiatan penunjang, *engineering*, eksplorasi dan perkapalan sebagai upaya untuk meningkatkan sinergitas antar BUMN.
6. Komisi VI DPR RI meminta kepada PT Pertamina (Persero) agar melaporkan hasil audit neraca baik yang menyangkut keuangan maupun audit teknis terkait dengan kinerja PT Pertamina sebagai perusahaan yang melakukan fungsi profit dan PSO. Pertamina juga diminta untuk dapat menyajikan secara transparan biaya produksi, biaya pemasaran, margin profit dari setiap kegiatannya.

III. PENUTUP

Rapat Dengar Pendapat ditutup pada pukul 19.30 WIB.

Jakarta, 8 Februari 2010

**PIMPINAN KOMISI VI DPR RI
KETUA RAPAT,**



Ir. AIRLANGGA HARTARTO, MMT, MBA
No. A-212